

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Encyclopedia Ilmu Sosial*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2000).
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media 2009).
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana 2018).
- Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: USAID, 2001).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Terjemahan dari General Theory of Law and State*, (Bandung: Nusa Media, 2014).
- \_\_\_\_\_, *General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg*, (New York: Russel & Russel, 1961).
- Henry Campbell Black, *Black Law's Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publishing, 1990).
- Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999).
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Joko J. Prithatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tata Nusa, 2001).
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2004).

- Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*, (Jakarta: UI Press, 1997).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Binacipta, 1986).
- Moh. Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Naya Amin Zaini, *Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 di Kota Semarang (Euforia Pilkada Serentak 2020)*, (Semarang: Bawaslu Kota Semarang, 2021).
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Nining Susanti, *Pengawasan Dalam Narasi dan Angka: Pilkada Kota Semarang 2020*, (Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, 2021).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Sidik Pramono, ed., *Seri Demokrasi Elektoral Buku 15 Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2002).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Sondang Siagian, *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi, dan Terapinya*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1994).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Syamsuddin Haris, ed., *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2017).

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

## **Jurnal**

Aprista Ristyawati, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, November 2020.

Djoni Gunanto, Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia, *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

Iqbal Nasir, Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2020.

Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Februari 2011.

Sri Wahyu Ananingsih, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1, Januari 2016.

Latipah Nasution, Pemilu dan Kedaulatan Rakyat, *ADALAH*, Vol.1 No. 9, 2017.

Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017.

M. Adian Firnas, Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi, *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 1, Juni 2016.

M. Lutfi Chakim, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014.

Muhammad Hoiru Nail, Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018.

Muhammad Ja'far, Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Madani Legal Review*, Vol 2, No. 1, Juni 2018.

Novrida Wulandari dan Ardianto, Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Humaniora*, Vol. 4, No. 1, April 2020.

Sri Wahyu Ananingsih, Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016.

Sutrisno, Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3, 26 September 2019.

Yulianto, Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 1, Maret 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.

## **Makalah**

Jimly Asshiddiqie, *Pengenalan Tentang DKPP untuk Penegak Hukum*, Makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Jakarta: Februari 2013).

\_\_\_\_\_, *Makalah Penegakan Hukum*.

## **Wawancara**

Naya Amin Zaini, *Wawancara*, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, (Semarang: 1 November 2022).

## **Internet**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2020, <https://ppid.semarangkota.bawaslu.go.id/> diakses pada tanggal 1 November 2022.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, Sejarah Pengawasan Pemilu, <https://semarangkota.bawaslu.go.id/> diakses pada tanggal 3 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 1 November 2022.

## **LAMPIRAN**